

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai satu dari sekian negara dengan tergolong sering terjadi kebencanaan, menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Resiko Bencana (UN-ISDR). Diantara semua wilayah, Jawa Timur khususnya Kabupaten Probolinggo merupakan daerah rawan bencana. Tahun 2022 bencana alam banjir terjadi di Kabupaten Probolinggo di desa kecamatan Tongas, Sumberasih, Desa Dringu, dan Leces. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk mengurangi pengaruh bencana.

Undang-Undang Pemerintah Pusat melalui Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 menjadi penanggung jawab pada penerapan penanggulangan, pemerintahan memiliki peran melalui berbagai program pembangunan, melindungi dari pengaruh kebencanaan, jaminan terpenuhi hak warga dan pihak yang terdampak kebencanaan dengan adil dan selaras pada standarisasi layanan minimum, serta memulihkan keadaan terdampak kebencanaan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) yang dibentuk melalui aturan UU Nomor 4 Tahun 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dibentuk dengan tujuan guna jaminan penerapan penanggulangan kebencanaan dengan proses rencana, padu, koordinasi, dan perataan seluruhnya terkait melindungi masyarakat

dari kondisi terancam, risiko, dan terdampak kebencanaan. Pelaksanaan guna menanggulangi kebencanaan seperti proses prabencana, tanggap kedaruratan, serta pasca kebencanaan (Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008).

Pemerintahan tidak mampu bekerja mandiri terkait pelaksanaan menanggulangi kebencanaan. Pasal 27 dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berisikan masing-masing individu memiliki kewajiban dalam tindakan proses menanggulangi kebencanaan. Regulasi ini serta melakukan pengaturan terkait peran partisipasi aktor seperti dari pihak swasta, lembaga bukan pemerintahan serta lembaga internasional terkait menanggulangi kebencanaan. Masyarakat serta organisasi bukan pemerintahan juga diperbolehkan berperan pada aktivitas relawan pada kegiatan menanggulangi kebencanaan serta meminimalisir risiko kebencanaan. Sehingga partisipasi baik masyarakat itu sendiri maupun dari pihak manapun itu mudah dalam pengarahannya serta pengkoordinasian, perlu diterapkan perumusan regulasi pada kinerja relawan dalam menanggulangi kebencanaan.

Faktor penting adanya kebencanaan menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi disebabkan minimnya pengetahuan terkait karakteristik bahaya, sikap, atau tindakan. Akibatnya yaitu minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya di alam, minimnya informasi terkait peringatan awal yang berdampak pada kemampuan dan kesiapan yang minim pada menanggapi kebencanaan (Bakornas, 2007). Jadi urgensi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan melalui teknik penerapan mitigasi kebencanaan yang wajib diketahui

oleh seluruh masyarakat. Agar mampu menekan jumlah korban jiwa (Hayudityas, 2020).

Aktivitas mitigasi kebencanaan mampu diterapjan melalui pemanfaatan potensi kelokalan milik daerah. Serta potensi kelokalan tidak hanya sebagai kemandfaatan pada proses mitigasi kebencanaan tapi juga sebagai langkah edukasi meliputi media belajar serta sumber pengedukasian lain-lain (Sumardi & Wahyudiati, 2021a, 2021b, 2022; Sutrisno et al., 2020; Wahyudiati, 2021, 2022; Wahyudiati & Fitriani, 2021).

Bencana menjadi bentuk insiden yang memberikan gangguan kehidupan masyarakat mulai faktor alami maupun faktor buatan yang menimbulkan dampak negatif meliputi terciptanya korban jiwa, rusaknya bangunan dan fasilitas, dan rusaknya lingkungan sekitar (Prayesti et al., 2020). Dampak negatif yang tercipta dari kebencanaan bukan hanya merugikan aspek materi, tapi juga menimbulkan korban jiwa dan korban selamat dapat terganggu segi mental dan psikologi masyarakat.

Bentuk keterlibatan adalah adanya organisasi yang kegiatannya dilakukan oleh relawan yaitu tanggap bencana. Aktivitas yang diselenggarakan oleh relawan seperti pada tim sukarela yang bergabung pada KSR PMI. Baron & Byrne (2003) fungsi keberadaan dan keterlibatan relawan merupakan fungsi nilai artinya guna menyaurkan ekspresi maupun tindakan pada nilai kemanusiaan.

Relawan sebagai personal memberikan sumbangan bebentuk tenaga maupun jasa, keahlian, serta waktu serta tidak memiliki maksud dan tujuan materi

dan menguntungkan diri sendiri dalam organisasi layanan dengan pengorganisasian aktivitas khusus melalui bentuk formal (Schroender, dikutip Bonar & Fransisca 2012). PMI menjadi lembaga sosial bidang kemanusiaan yang netral dan kemandirian bertujuan dalam memberikan bantuan, meberikan dukungnanagar derita korban kebencanaan berkurang, mulai dari kebencanaan alam serta kebencanaan dampak tindakan manusia (PMI, 2005).

Pada organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) memuat media bagi relawan diseluruh bagian wilayah dan elemen masyarakat mulai golongan remaja hingga orang tua. Bahkan ditindak lanjuti dalam media contohnya relawan remaja (Palang Merah Remaja), relawan korps sukarela (KSR Perguruan tinggi dan KSR PMI Kabupaten/Kota, relawan tenaga sukarela (TSR, Berbasis Masyarakat, Komunitas), dan donor darah sukarela (DDS). Penggolongan ini tidak sebatas golongan saja tapi dari setiap golongan relawan memuat peran maupun tugas bervariasi pada penyelenggaraan misi kemanusiaan.

Organisasi PMI (Palang Merah Indonesia) terdapat struktural dan elemen organisasi meliputi pengurusan, keanggotaan, sukarelawan serta pegawai dengan memuat tiap peran selaras pada penetapan regulasi. Guna meraih tujuan, PMI dalam pengembangannya dalam aktivitas seperti menanggulangi kebencanaan, layanan sosial dan layanan kesehatan, transfusi darah, pengembangan organisasi, dan lainnya (PMI, 2005). Prinsip dasar gerakan palang merah (Sukandar, 2009) yakni: a) Kemanusiaan, b) Kesamaan, c) Kenetralan, d) Kemandirian, e) Kesukarelaan, f) Kesatuan, dan g) Kesemestaan. Pada penetapan AD/ART PMI, yang dikenal sebagai anggota PMI merupakan setiap Warga Negara Indonesia

yang memiliki kesediaan sebagai anggota (Sukandar, 2009) meliputi: 1) Anggota Remaja, 2) Anggota Biasa, 3) Anggota Luar Biasa, 4) Anggota Kehormatan.

Gambar 1

Kegiatan Mitigasi Bencana Alam Penanaman Pohon Bakau



Sumber : PMI Kabupaten Probolinggo, 2022

Menurut Ulla Nuchrawaty Usman, Pedoman Menejemen Relawan (Ksr-Tsr) 2008, mengatakan bahwa PMI (Palang Merah Indonesia) bertugas pada cakupan meluas dan beragam terutama dalam unauue kemanusiaan. Pada tugas kemanusiannya PMI (Palang Merah Indonesia) ada keunikan yang mana seluruh kegiatan utama diselenggarakan oleh relawan. Dalam organisasi PMI (Palang Merah Indonesia) relawan itu bisa diartikan dengan pihak yang menerapkan aktivitas palang merah dengan baik dengan ketetapan relevan pada prinsip PMI.

Anggota sukarelawan yang ada pada PMI merupakan Korps sukarela (KSR) menjadi wadah bagi anggota biasa dan individu dengan secara sadar sebagai anggota KSR. Penanganan kebencanaan memuat ragam tugas yang dilaksanakan oleh sukarelawan PMI, contohnya memberikan bantuan pada korban yang mengungsi, yakni bantuan keringanan beban masyarakat yang mengungsi,

memberikan bantuan memenuhi kebutuhan dasar yang mengungsi, memberikan bantuan menenangkan korban di pengungsian, pengaturan distribusi perbantuan, bantuan menangani masalah yang tercipta dari interaksi warga di pengungsian dan masyarakat luas (Hazri, 2012).

Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Probolinggo itu sendiri merupakan salah satu wadah sukarelawan yang berada dalam naungan PMI Kabupaten Probolinggo. Menjadi seorang anggota Korps Sukarela (KSR) perlu ada kesadaran pengabdian bidang kemanusiaannya guna perwujudan peran PMI pada penyelesaian tugasnya dengan optimal.

Menjadi seorang anggota KSR PMI Kabupaten Probolinggo diharapkan guna memuat sukarelawan PMI yang memiliki kebaikan dalam kepribadian, setia kawan, jiwa sosial kemanusiaan dan bermental kuat disertai percaya diri. Alasannya pada penerapan tugas palang merah seperti pada insiden bencana alam maupun kecelakaan, dengan keberanian dalam bertindak secara medis seperti perawat atau dokter disertai kemampuan, ilmu pengetahuan, dan mental agar dapat penyesuaian diri pada seluruh keadaan.

Pada proses sebagai sukarelawan PMI akan dibagikan pendidikan dan pelatihan yang memuat proses pembekalan ilmu, kemampuan, dan tindakan guna pelaksanaan tugas selaras prinsip dasar PMI. Hal sebagai bentuk ketentuan dan persyaratan guna berperan sebagai sukarelawan KSR (Korps Sukarela) guna pemupukan jiwa kemanusiaan atau jiwa sosial dan bermental kokoh.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran itu sendiri berarti perangkat tingkat pada kedudukan masyarakat. Intinya sebagai berperilaku oleh individu, organisasi, lembaga ataupun sekelompok fungsi khusus pada lingkungan masyarakat. Peran berkaitan pada sikap yang diterapkan oleh Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Probolinggo pada pembentukan anggota dengan kesiapan berjalannya program kerja dan aktivitas tindakan pertolongan awal.

Berikut bentuk riset sebelumnya yang berhubungan dengan riset dengan tema sama oleh para peneliti. Peran Korps Sukarela (KSR) PMI merupakan untuk memberikan bantuan pemerintahan pada bidang sosial kemanusiaan, khususnya pada tugas palang merah yang mana telah menjadi syarat pada ketentuan konvensi Jenewa 1949 yang diratifikasi pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1958 pada Undang-Undang Nomor 59. Salah satu tugas Korps Sukarela (KSR) PMI itu sendiri yang mana sudah selaras pada mandat dengan menolong dan membantu korban kebencanaan dengan tepat tanpa melihat perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan.

Penelitian terdahulu selanjutnya masih terkait dengan riset yang diselenggarakan peneliti. Korps Sukarela (KSR) sebagai bentuk organisasi dengan pengembanan misi kemanusiaan. Dalam peranan KSR (Korps Sukarela) itu sendiri pada masyarakat memuat banyak kendala yaitu langkah pembelajaran masyarakat pada resiko kebencanaan disertai tahapan yang tepat guna meminimalisir resiko kebencanaan.

Riset sebelumnya berkaitan dengan riset yang diselenggarakan oleh peneliti. Kesiagaan menjadi aspek penting pada Korps Sukarela (KSR) (Alim et al., 2015). Hal ini selaras dengan riset Pesiridis, 2015 bahwa tingkat pemahaman milik individu terpengaruh informasi dihimpun dari pendidikan formal dengan institusi dan pendidikan non formal dengan workshop, latihan, seminar, webinar serta simulasi. Siaga kebencanaan memuat faktor yang memberikan pengaruh pada pendapat, pendidikan, dan informasi (Pesiridis et al., 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi oleh penulis, sehingga ada temuan hal yang sama dan pembedaa dari riset penulis. Riset dengan analisa Edukasi manajemen kebencanaan yang diterapkan oleh Korps Sukarela (KSR) PMI. Sedangkan riset saat ini berorientasi pada peran Korps Sukarela (KSR) PMI (Palang Merah Indonesia) terhadap mitigasi kebencanaan alam di Kabupaten Probolinggo. Untuk itu penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode kualitatif.

Korps Sukarela (KSR) menjadi salah satu organisasi dengan pengembangan misi kemanusiaan di Kabupaten Probolinggo. Terdapat aktivitas kemanusiaan yang diterapkan pada KSR PMI Kabupaten Probolinggo yaitu seperti program donor darah secara sukarela, menolong dengan tindakan pertama dan pengevakuasian pada kecelakaan, kebencanaan dan konflik, layanan pada program dengan basis masyarakat, dan menjadi satuan siaga penanggulangan bencana.

KSR PMI Kabupaten Probolinggo adalah tempat yang sesuai untuk penerus bangsa dan individu sebagai relawan. Guna manusia dengan kepedulian serta tanggung jawab pada kehidupan masyarakat dan berbangsa, maka sebagai relawan PMI menjadi teknik perwujudan melalui prinsip organisasi PMI yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. pada peran KSR di lingkungan, penulis dapat ditemukan hambatan tentang kurangnya tindakan KSR itu sendiri untuk turun langsung kepada masyarakat untuk lebih mengenalkan kegiatan mitigasi bencana alam yang mana bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko saat terjadi bencana.

Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, maka diharapkan peran KSR itu sendiri dapat menarik minat masyarakat untuk sama-sama melakukan tindakan mitigasi bencana alam di daerah masing-masing untuk menimalisir terjadinya resiko bencana yang akan datang. Selain itu, adanya tindakan kegiatan pendampingan dari anggota KSR PMI Kabupaten Probolinggo terkait dengan kegiatan mitigasi bencana alam yang akan dilakukan di daerah masing-masing khususnya daerah yang rawan terdampak bencana. Tujuan adanya tindakan dari KSR PMI Kabupaten Probolinggo ini dilakukan sebagaimana melakukan peranannya dalam aksi kemanusiaan yang mana akan sangat berguna bagi masyarakat setempat.

Relevan pada pemaparan diatas, maka penulis tertarik dalam menyelenggarakan riset berjudul, **“Peran KSR (Korps Sukarela) PMI dalam Mitigasi Bencana Alam (Studi pada KSR PMI Kabupaten Probolinggo)”**

B. Rumusan Masalah

Masalah riset ini bersumber pada peran KSR (Korps Sukarela) antara penelitian terdahulu dan fakta yang terjadi saat ini seputar fokus penelitian, yang menghadirkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

”Bagaimana tindakan yang dilakukan KSR (Korps Sukarela) PMI dalam melakukan perannya terhadap kegiatan mitigasi bencana alam yang berada pada Kabupaten Probolinggo ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan riset meliputi :

1. Tujuan Umum

Dikarenakan riset ini merupakan penelitian dasar sehingga perumusan tujuan umum dan tujuan khusus riset meliputi:

- a) Guna mengetahui sikap yang diselenggarakan KSR (Korps Sukarela) PMI pada melakukan perannya terhadap kegiatan mitigasi bencana alam yang berada di Kabupaten Probolinggo.
- b) Untuk lebih menjelaskan mengenai peran KRS (Korps Sukarela) PMI itu sendiri yang dapat penemuan riset terdahulu tapi belum digali dengan detail.
- c) Guna penjas perbedaan teori dan hasil riset pada penemuan di lokasi riset dan keadaan faktual

2. Tujuan Khusus

Penetapan tujuan khusus pada riset sebagai jawaban dari pertanyaan riset selaras perumusan masalah riset meliputi:

- a) Guna memahami upaya yang diterapkan oleh Korps Sukarela (KSR) PMI dalam melakukan peranannya terhadap mitigasi bencana alam yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo
- b) Untuk mengetahui perkembangan yang dilakukan oleh KSR (Korps Sukarela) PMI dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana alam yang berada di Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Menjembatani riset terdahulu, harapan dengan adanya peran KSR (Korps Sukarela) ini dapat menambah pengetahuan mengenai mitigasi bencana alam seputar topik penelitian.
- b) Menjembatani penelitian terdahulu, harapan mampu membagikan input serta saran untuk sukarelawan KSR PMI Kabupaten Probolinggo melakukan perannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana alam.
- c) Untuk lebih menjelaskan mengenai KSR (Korps Sukarela) PMI dalam melakukan peranannya yang ditemui pada riset

terdahulu akan tetapi masih belum dilakukan penggalian riset secara detail.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Lembaga Universitas, dituntut sebagai khazanah pengetahuan terkait pengetahuan mengenai menjadi seorang relawan Korps Suka Rela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) yang harus siap siaga tentang rasa peduli sosial atau aksi kemanusiaan, maupun mampu sebagai acuan referensi bagi riset selanjutnya
- b) Bagi Mahasiswa, riset ini ditujukan memberikan nilai guna serta memberikan manfaat untuk para mahasiswa atau personal lainnya yang membaca dan menjadi bahan pengembangan maupun inout mengenai sukarelawan Korps Sukarela (KSR).
- c) Bagi Penulis, dengan keberadaan riset menjadi ketentuan mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Panca Marga. Serta berguna penambahan pengetahuan dan pengalaman agar mampu melakukan pengembangan ilmu yang didapatkan saat dibangku kuliah.

E. Sistematika Penulisan

Guna pemahaman pada laporan, maka materi yang termuat dalam pelaporan skripsi ini digolongkan pada bagian bab dengan sistematika penulisan meliputi:

Bab 1 : Pendahuluan memuat latar belakang sebagai penjelasan terkait permasalahan diangkat dalam riset ini. Perumusan masalah pada riset adalah bagaimana tindakan yang dilakukan KSR (Korps Sukarela) PMI dalam melakukan perannya terhadap kegiatan mitigasi bencana alam yang berada di Kabupaten Probolinggo.

Bab 2 : Kajian Pustaka menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka dasar teoritik, kerangka berfikir, dan argument sementara sebagai jawaban sementara dari penelitian ini atau dikenal dengan hipotesis, mengenai peran KSR (Korps Sukarela) PMI dalam mitigasi bencana alami Kabupaten Probolinggo.

Bab 3 : Metode riset membahas tentang metode riset sebagai acuan peneliti bagaimana mendapatkan data-data mengenai peran KSR (Korps Sukarela) dalam melakukan mitigasi bencana alam di Kabupaten Probolinggo.

Bab ini memuat pendeskripsian terkait waktu dan lokasi riset, metode penghimpunan data riset menerapkan wawancara, observasi, dan penjelasan konsep perkembangan tersistematis dengan penerapan riset validasi sistem yang merancang prosedural, analisa kebutuhan masukan dan luaran, rancangan data. Adapun penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan berisikan tentang hubungan kualitatif deskriptif yang terkait dengan peran KSR (Korps Sukarela) PMI dalam mitigasi bencana alam di Kabupaten Probolinggo.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil riset, dan memuat saran guna memperbaiki dan menindaklanjuti hasil riset terkait peran KSR (Korps Sukarela) PMI dalam mitigasi bencana alam di Kabupaten Probolinggo.